

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Partai politik sebagai kekuatan politik mempunyai hak dan bagian dalam setiap pemilihan umum. Pada setiap partai politik menganut ideologinya masing-masing dan bergerak berdasarkan konsensus-konsensus yang telah dibuat sebelumnya. Menurut Budiardjo (1993:160) partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kekuasaan politik dengan cara konstitusi untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan menurut kesepakatan mereka.

Pada awal runtuhnya Orde Baru, politik aliran yang sudah lama dipadamkan kembali bermunculan. PPP (Partai Persatuan Pembangunan) yang sudah lebih dari dua dekade dipaksa menanggalkan asas Islam, meneguhkan kembali partai berasaskan Islam. Kekuatan partai-partai Islam setelah runtuhnya kekuasaan Orde Baru mulai bisa diperhitungkan dalam dunia perpolitikan di Indonesia, walaupun memang dalam kenyataannya partai-partai Islam tersebut berdiri dari golongannya masing-masing, di antara partai-partai yang bercorak Islam tersebut memiliki cara pandang yang berbeda didalam memahami relasi Islam dan politik, khususnya berkaitan dengan upaya untuk memperjuangkan nilai-nilai Islam kedalam kehidupan bernegara (Marijan, 2011 : 309).

Pada pemilihan umum 1999 banyak partai-partai politik Islam yang tumbuh, akan tetapi partai politik yang berasaskan Islam tidak bisa berbicara banyak maupun memenangkan kursi terbanyak dalam pemilihan umum. Pada pemilu (pemilihan umum) 1999 PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) mendapat perolehan suara terbanyak akan tetapi yang menjadi

pemenang dalam pemilihan umum legislatif adalah PDIP. Berbeda dengan pemilihan Presiden yang membuat penulis tertarik disini ternyata dalam SU (Sidang Umum) MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) yang secara hitung-hitungan rasional akan dimenangkan oleh calon presiden dari PDIP yaitu Megawati Soekarno Putri ternyata anggapan tersebut salah dengan keluarnya Gus Dur sebagai Presiden terpilih dalam Sidang Umum MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) tersebut (Ricklefs, 2009 : 711).

Begitu berartinya suatu strategi yang diperlukan dan salah satu strategi yang bisa diambil adalah dengan mengadakan koalisi. Berdasarkan jumlah perolehan kursi di DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), maka total kursi yang diraup partai-partai Islam adalah 172 kursi (Kamaruddin, 2003: 121). Jumlah tersebut diperoleh dari penjumlahan perolehan kursi 10 partai yang dikategorikan partai Islam: PPP, PKB (Partai Kebangkitan Bangsa), PAN (Partai Amanat Nasional), PBB (Partai Bulan Bintang), PK (Partai Keadilan), PNU (Partai Nahdlatul Ulama), PSII (Partai Syarikat Islam Indonesia) Masyumi, dan PKU (Partai Kebangkitan Umat). Hasil ini tentu tidak bisa dipandang sebelah mata bagi kekuatan politik lain, yakni PDI Perjuangan yang memperoleh kursi 153 kursi dan partai Golkar 120 kursi.

Berbagai inisiatif menuju terwujudnya penyatuan kekuatan politik Islam yang gencar digulirkan untuk menghadapi pemilihan umum dan pemilihan presiden tahun 1999, sebelumnya ada dua kali upaya, yakni yang pertama pembentukan forum silaturahmi partai-partai politik Islam sebelum pelaksanaan pemilu 1999 dan yang kedua adalah *Stembus Accord* delapan partai politik Islam setelah pemilu 1999 berlangsung (Kamarudin, 2003 : 123). Namun menjelang SU MPR pertama pembentukan forum silaturahmi partai-partai politik Islam dan *Stembus Accord* delapan partai politik Islam tidak mendapat dukungan yang memadai, hal tersebut disebabkan karena apabila koalisi partai Islam tersebut terjadi dan mengklaim sebagai poros Islam atau Fraksi Islam maka akan menimbulkan kekisruhan dan akan memperkeruh suasana. Aliran-aliran yang lain selain Islam akan mengklaim

dan membentuk sendiri fraksi atau porosnya masing-masing sesuai dengan aliran yang dianutnya.

Ide poros tengah mencuat karena beberapa hal di atas setelah disuarakan oleh Amien Rais. Amien Rais tampaknya punya alasan sendiri mengapa ia sangat bersemangat terus-menerus mensosialisasikan dan mencari dukungan untuk kaukus ini. Alasan mengapa Amien Rais sangat bersemangat dengan strategi ini, Najib (2000 : 40) mengungkapkan bahwa, pertama, ia sangat khawatir dengan polarisasi dan persaingan antar pendukung Megawati dan Habibie yang sudah memainkan isu yang sangat sensitif yaitu agama, sehingga muncul kesan seolah-olah kompetisi Megawati dengan Habibie merupakan pertarungan antara kelompok sekuler dengan umat Islam. Kedua, baik kubu Habibie maupun Megawati tidak menunjukkan kesungguhannya untuk mengakomodasi dan mengagendakan tuntutan reformasi. Karena itu, perlu alternatif lain yang lebih menjamin integrasi bangsa di satu sisi dan pelaksanaan agenda reformasi di sisi lain. Dari kedua alasan Amien Rais di atas dapat dijelaskan bahwa maksud Amien Rais ingin menyelamatkan demokrasi yang baru saja dibentuk pada saat itu dan dapat menjalankannya dengan baik.

Pencalonan Gus Dur sebagai calon Presiden Indonesia yang diusung oleh poros tengah juga menjadi perdebatan. Karena Amien Rais yang pernah menjadi ketua umum Pemimpin Pusat Muhammadiyah mencalonkan Gus Dur yang merupakan tokoh Nahdhatul Ulama, kedua jamaah Muslim terbesar di Indonesia yang sering kali bergerak menjauh dan saling kritik, akan tetapi di balik kontroversi tersebut ternyata Amien Rais mempunyai tujuan agar poros tengah ini untuk membangun ukhuwah Islamiyah, khususnya antara Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama (Suharsono, 1999:80).

Menyadari bahwa gabungan suara poros tengah belumlah cukup untuk menggolkan calon presiden, Amien Rais dan para elit politik partai politik Islam lainnya gencar melakukan lobi-lobi politik (Kamaruddin, 2003 : 145). Faktor lobi politik ini ternyata memiliki dampak yang signifikan.

Bahkan ia bisa mengatasi dan menembus tembok-tembok penghalang kepentingan partai politik yang membawa presiden yang diusung poros tengah ini menang.

Hal lain yang menjadi keresahan yaitu saat Megawati naik untuk menggantikan Gus Dur karena beberapa kesalahan yang dilakukan, salah satu yang paling fatal yaitu dalam kasus penyalahgunaan dana bantuan Sultan Brunei dan dana Bulog (Iqbal dan Nasution, 2010:302). Naiknya Megawati sebagai Presiden menjadi tidak wajar apabila dilihat dari sudut pandang Islam dalam hal ini dari partai politik Islam, karena dalam Islam tersendiri yang wajib menjadi Imam atau pemimpin harus seorang laki-laki.

Memasuki Pemilu 2004 semua partai politik terutama yang lolos verifikasi tahap ketiga dan yang terdaftar di KPU benar-benar siap bertarung untuk memperebutkan kursi kekuasaan baik untuk legislatif (DPR dan DPD) maupun pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Bagi umat Islam yang tumpuannya ialah partai-partai politik yang memiliki basis keumatan yaitu partai-partai Islam tentu saja Pemilu 2004 pun merupakan momentum untuk mengukur seberapa jauh representasi politik Islam dalam kancah nasional. Apakah jumlah mayoritas secara demografis seiring dengan kekuatan secara politik atau justru malah sebaliknya. Masalah yang satu ini tentu sangat menentukan sekaligus penuh kerawanan sebab selama ini jumlah mayoritas umat Islam tidaklah sebanding dengan suara mayoritas secara politik, sehingga Islam politik atau kekuatan politik umat Islam selalu menelan kegagalan dan kekalahan. Di sinilah apa yang disebut dengan partai politik Islam dipertaruhkan. Selain ketidakselarasan antara kekuatan demografis dan kekuatan politik, umat Islam di Indonesia juga masih terjebak pada perdebatan konseptual dan strategi mengenai partai politik Islam (Nashir, 2004 : 1).

Selain itu masih ada masalah lain yang ditanggung oleh partai Islam di Indonesia antara lain, Partai-partai Islam selalu terjebak pada eksklusivisme dan tetap terhambat untuk tumbuh menjadi partai besar yang menjadi milik

rakyat Indonesia. Secara kategoris baik partai maupun tokoh Islam politik selalu menjadi miopik, kerdil, dan terbatas, yang pada akhirnya cenderung dipersepsi sebagai hanya partai Islam milik umat Islam tertentu, bukan partai nasional milik bangsa (Nashir, 2004: 2). Jangankan menjadi milik bangsa secara mayoritas, menjadi milik mayoritas umat Islam pun tidak pernah.

Selain dari permasalahan di atas perbedaan terjadi pada partai-partai Islam di Indonesia pada saat pemilihan umum legislatif maupun Presiden 2004 dengan pemilihan umum legislatif dan Presiden 1999 yaitu pada pemilihan 1999 Islam dijadikan Ideologi yang membangun dan menguatkan suatu partai pada saat itu, berbeda dengan pemilihan umum 2004 yang pada tataran isu politiknya hampir tidak terdengar adanya eksploitasi Agama (Islam) sebagai alat penjaringan dukungan justru yang diangkat adalah isu kerakyatan dan program kerja secara khusus (Utaria, 2008 : 46).

Secara idealis pemilu 2004 dijadikan sebagai ajang tampilnya Islam ideologis dengan menampilkan politik santri untuk menjadi presiden atau wakil presiden, muncul nama Amien Rais, Hamzah Haz, Hasyim Muzadi, dan Shalahuddin Wahid (Shobron, 2012 : 14). Empat santri ini, tiga dari kalangan Islam tradisional dan orang yang berpengaruh di Nahdhatul Ulama, bahkan Hasyim Muzadi sebagai ketua PB NU, dan satu dari kalangan Islam modernis, mantan ketua umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Namun ternyata tidak ada satupun yang lolos pada putaran pertama pemilihan presiden. Hanya memunculkan dua calon, yakni Megawati-Hasyim Muzadi dan Susilo Bambang Yudhoyono-Yusuf Kalla. Dalam putaran kedua pemilu presiden langsung ini, partai-partai islam lebih suka merapat kepada pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Yusuf Kalla. Sebagai imbalannya, dalam penyusunan Kabinet Indonesia Bersatu, partai-partai pendukung Susilo Bambang Yudhoyono-Yusuf Kalla memperoleh jatah menteri (Iqbal dan Nasution, 2010 : 306). dan akhirnya putaran kedua pemilu presiden dimenangkan oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Yusuf Kalla. Hal itu menandakan fragmentasi umat kembali terjadi, karena keempat santri

tersebut secara politis terpisah, padahal sama-sama merebut suara dari umat Islam.

Pemaparan di atas mengindikasikan bahwa persatuan umat Islam sendiri perlahan mulai memudar dalam kancah perpolitikan di Indonesia terutama dalam memilih Pemimpin negara. Strategi yang dipakai dalam setiap pemilihan Presiden yang digunakan oleh partai Islam di Indonesia sangat menarik untuk dikaji oleh karena itu penulis memilih judul *Strategi Partai Politik Islam dalam Panggung Pemilihan Presiden di Indonesia Tahun 1999-2004*. Sebagai sebuah kajian sejarah perpolitikan partai Islam di Indonesia.

1.2 Perumusan Masalah

Masalah secara umum yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah “Bagaimana strategi partai politik Islam dalam menghadapi pemilihan Presiden tahun 1999 dan 2004 di Indonesia”, adapun pertanyaan penelitian dan pembatasan masalah secara rinci adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi partai Islam dalam Pemilu Legislatif 1999 dan 2004 di Indonesia?
2. Mengapa strategi poros tengah yang dilakukan oleh partai Islam mampu memenangkan pemilihan Presiden tahun 1999 di Indonesia?
3. Bagaimana pandangan partai Islam dan organisasi Islam mengenai naiknya Presiden perempuan pertama di Indonesia?
4. Bagaimana strategi partai Islam dalam pemilihan Presiden tahun 2004 di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang saya ajukan di atas, terdapat beberapa tujuan penelitian diantaranya sebagai berikut :

1. Mengkaji strategi yang dilakukan oleh partai Islam dalam Pemilu tahun 1999 dan 2004 di Indonesia
2. Menganalisis keberhasilan poros tengah dalam pemilihan Presiden tahun 1999 di Indonesia
3. Mengkaji pandangan partai Islam dan organisasi Islam terhadap naiknya Presiden perempuan pertama di Indonesia
4. Mengkaji strategi yang dilakukan oleh partai Islam dalam pemilihan Presiden tahun 2004 di Indonesia

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian secara khusus yang penulis harapkan adalah sebagai berikut:

1. Menambah khasanah dalam penulisan sejarah setelah reformasi di Indonesia.
2. Memberikan kontribusi dalam memahami pemerintahan setelah reformasi dari aspek politik, terutama mengenai partai Islam.
3. Media informasi dalam menanggapi pemerintahan presiden perempuan dari sudut pandang politik.
4. Salah satu referensi dalam materi mata pelajaran Sejarah di SMA kelas XII yang sesuai dengan SKKD yaitu menganalisis perkembangan pemerintahan setelah Reformasi.

1.5 Struktur Organisasi Skripsi

Adapun sistematika dari penulisan skripsi ini diantaranya yaitu sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, pada bab ini akan dipaparkan masalah dan alasan penulis mengkaji penelitian mengenai strategi partai politik Islam dalam pemilihan Presiden di Indonesia tahun 1999-2004. Selain latar belakang

dalam bab ini di dalamnya terdapat sub bab yakni rumusah masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi penelitian.

Bab II Kajian Pustaka, akan memaparkan mengenai buku-buku maupun sumber penelitian lainnya yang menjadi sumber utama penulis dalam melakukan penelitian mengenai strategi partai politik Islam dalam pemilihan Presiden di Indonesia tahun 1999-2004, yang dapat berupa buku maupun Koran serta sumber internet yang dianggap relevan oleh penulis.

Bab III Metode Penelitian, dalam bab ini penulis akan memaparkan mengenai metode atau proses yang akan dilaksanakan dalam melakukan penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis serta studi literatur dan studi dokumentasi dalam melakukan heuristik. Proses penelitian disesuaikan dengan Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UPI dan berdasarkan ejaan yang disempurnakan (EYD).

Bab IV Strategi Partai Politik Islam dalam pemilihan Presiden tahun 1999-2004 di Indonesia, Bab ini akan memaparkan hasil penelitian dan pengolahan atau analisis data dan fakta yang ditemukan oleh penulis yang berkaitan dengan strategi partai politik Islam dalam pemilihan Presiden di Indonesia tahun 1999 dan 2004. Dalam Bab ini penulis akan memaparkan strategi yang digunakan partai politik Islam dalam pemilihan Presiden tahun 1999, kemudian pandangan partai Islam setelah naiknya Presiden perempuan pertama di Indonesia dan yang terakhir adalah strategi yang digunakan partai Islam dalam pemilihan Presiden tahun 2004.

Bab V Simpulan dan Saran. Bab ini merupakan pembahasan terakhir dimana penulis memberikan suatu kesimpulan dari hasil interpretasi terhadap kajian penelitian. Interpretasi penulis ini disertai dengan analisis penulis dalam membuat kesimpulan atas jawaban-jawaban dari permasalahan-permasalahan yang dirumuskan dalam suatu rumusan masalah. Selain itu, dalam bab ini pula terdapat saran yang berguna untuk semua orang yang terkait dengan penelitian ini.

Vicky Amiruddin, 2015

STRATEGI PARTAI ISLAM DALAM PANGGUNG PEMILIHAN PRESIDEN DI INDONESIA TAHUN 1999-2004

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu